©2023 by author(s)
Vol. 7, No. 1, pp. 102-119.
DOI: 10.32787/ijir.v7i1.444

GERAKAN FEMINISME DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PASIFIK SELATAN

Khansa Deryqa Prihadiansyah
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
Khansa.deryqa.prihadiansyah-2021@fisip.unair.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received
3 February 2023

Revised
21 February 2023

Accepted
27 February 2023

Keywords:
equality; feminism; Pacific Islands; peace-building; women.

Kata Kunci:
feminisme; Kepulauan Pasifik; kesetaraan; pembangunan perdamaian; wanita.

Abstract
This article aims to describe how the values and views of feminism move in the Pacific Islands region to build peace. The concept of feminism in peacebuilding is used in qualitative research, as well as in library studies. The results of the study show that the implementation of feminist values in the women's movement in building peace in the Pacific Islands region arises due to the high number of problems women face due to inequality in conflict and everyday life. The application of feminism in peacebuilding in the Pacific Islands region is carried out alongside the traditional view of women held by Pacific Islanders, departing from the majority of movements in the Pacific region that do the same thing instead of shifting existing values. However, the biggest unresolved problem is the lack of representation of women in the legislatures of Pacific Island countries, which has encouraged the feminist movement in peacebuilding to focus on the regional level.

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nilai dan pandangan feminisme bergerak di kawasan Kepulauan Pasifik untuk membangun perdamaian. Konsep feminisme dalam pembangunan perdamaian digunakan dalam penelitian kualitatif, juga dalam studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai feminis dalam gerakan wanita dalam membangun perdamaian di kawasan Kepulauan Pasifik muncul akibat tingginya permasalahan yang dihadapi wanita akibat ketidaksetaraan dalam konflik dan kehidupan sehari-hari. Penerapan feminisme dalam pembangunan perdamaian di kawasan ini dilakukan berdampingan dengan pandangan tradisional tentang wanita yang dianut masyarakat Kepulauan Pasifik, berangkat dari mayoritas gerakan di kawasan Kepulauan Pasifik yang melakukan hal yang sama alih-alih menggeser nilai-nilai yang ada. Namun, masalah terbesar yang belum terselesaikan adalah kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif negara-negara Kepulauan Pasifik, yang mendorong gerakan feminis dalam peacebuilding untuk fokus di tingkat regional.

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Persamaan antara feminisme dan perdamaian dibahas oleh Warren dan Cady (1994) yang menjelaskan bahwa keduanya merupakan konsep dari hasil interaksi yang didominasi oleh sebuah sistem dengan hak istimewa. Pentingnya menjaga kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan internasional saat ini tengah mengalami peningkatan. Ketika keluarga sebagai dasar dari masyarakat sudah membiasakan kekerasan berdasarkan diskriminasi gender, maka hal ini akan dilihat sebagai sebuah hal yang normal dan wajar terjadi dalam konflik (Bunch, 2003). Oleh karena itu, banyak gerakan wanita dan organisasi dengan dasar feminisme mengangkat isu diskriminasi gender sebagai langkah awal menghentikan kekerasan dalam skala besar seperti konflik bersenjata.

Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh terhadap upaya kesetaraan gender ini dapat dilihat dalam Resolusi 1325 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi dasar dari banyak hukum dan kebijakan, baik oleh pemerintah sebuah negara maupun organisasi non-negara untuk menjamin kesejahteraan wanita dan pengakuan atas peran mereka untuk mencapai perdamaian.

Pengakuan atas kekerasan yang dihadapi wanita merupakan dasar dari konsep feminisme dalam perdamaian dan hak manusia. Hal ini dikarenakan dominasi laki-laki yang masih dianggap normal di dalam berbagai institusi menyebabkan kekerasan dan ancaman terhadap wanita bertahan (Bunch, 2003). Banyak organisasi berbasis gender dan dengan sudut pandang feminisme berangkat dari gerakan sosial.

W*omen's International League for Peace and Freedom* atau WILPF merupakan salah satu organisasi dengan paham feminisme yang dibentuk pada masa Perang Dunia II. Dalam laman resmi mereka https://www.wilpf.org/ menjelaskan bahwa feminisme bukanlah upaya untuk mendorong wanita agar posisinya berada di atas laki-laki, melainkan kepercayaan bahwa semua manusia penting tanpa adanya batas konstruksi gender, baik laki-laki, wanita, maupun gender lainnya (Women's International League for Peace & Freedom, 2022). Gerakan sosial yang dimaksud mengangkat berbagai topik, mulai dari upaya memberikan suara terkait kebijakan yang hendak diambil, hingga upaya menghilangkan kekerasan dan memberikan hak wanita.

Wilayah Kepulauan Pasifik masih mengalami banyak konflik antarkelompok

dan wilayah, seperti Fiji yang mengalami pemberontakan pada tahun 2000 dan menyebabkan pejabat negara tersebut dilengserkan dari jabatannya. Selain itu ada pula Kepulauan Solomon yang mengalami peningkatan konflik antarsuku dan penurunan jabatan pemerintah, dan sejumlah konflik lainnya di wilayah regional tersebut, yang sayangnya justru menghasilkan kebijakan yang menyenggol teritori pergerakan wanita yang berusaha membangun perdamaian pula (George, 2014). Konflik-konflik ini juga mendorong wanita untuk bergabung ke dalam kelompok perdamaian, seperti yang terjadi di Honiara dan Guadalcanal (Kabutaulaka, 2002 dalam Corrin, 2008).

Wilayah Kepulauan Pasifik merupakan wilayah yang masyarakatnya masih mengaplikasikan banyak nilai tradisional ke dalam praktik politik mereka, termasuk ke dalam upaya untuk mencapai perdamaian. Perbedaan dalam nilai feminisme yang dijalankan untuk mencapai perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik dengan negara lainnya terletak dalam nilai tradisional yang masih kental di masyarakat Pasifik dan diaplikasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk politik, ekonomi, dan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam piagam yang dibentuk dengan dasar femisme pada tahun 2016 di Fiji. Piagam ini menggarisbawahi persamaan yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Pasifik di antara perbedaan yang menimbulkan konflik, yaitu *wansolwara* atau laut, *vanua* atau tanah, dan *tua'a* atau nenek moyang (Pacific Feminist Forum, 2016).

Dari pengenalan di atas, pertanyaan untuk mendasari penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan feminisme digunakan dalam upaya membangun perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik? Argumentasi bagi penelitian ini adalah bahwa penggunaan feminisme sebagai sudut pandang untuk mencapai perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik merupakan salah satu langkah yang tepat. Patriarki masih menjadi nilai yang kental di wilayah Kepulauan Pasifik, dan hal ini berlaku ke dalam unsur politik serta ekonomi mereka. Nilai patriarki dan pemenuhan posisi penguasa sering kali menimbulkan masalah karena adanya keinginan bersaing secara ekstrim. Seperti yang dinyatakan oleh George (2010), perilaku politik di wilayah Kepulauan yang maskulin dan bersaing secara ekstrim tanpa ingin mengalah sehingga bertabrakan dengan nilai feminisme di wilayah Kepulauan Pasifik, yaitu dengan

menghubungkan isu yang ada dengan keluarga dan keibuan sebagai dua sifat yang kental berada pada wanita di wilayah Pasifik. Ini membuktikan pendapat Warren dan Cady (1996) yang melihat bahwa dominasi pria menyebabkan perang dan perdamaian berputar di sekitar patriarki yang menganggap *pacifist* atau pihak yang memilih damai sebagai pihak yang naif dan cengeng, sementara pejuang merupakan pahlawan. Peningkatan jumlah pergerakan wanita dan pandangan feminisme ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengurangi konflik di wilayah Kepulauan Pasifik.

Salah satu pergerakan wanita yang bertujuan untuk membangun perdamaian dilakukan oleh *Women's International League for Peace and Freedom* atau WILPF yang dimulai di wilayah Inggris. WILPF yang pada awalnya dinamakan Woman's Peace Party (Schott, 1997) dibentuk dengan tujuan untuk membentuk strategi mediasi untuk menyelesaikan perang pada tahun 1915, satu tahun setelah rencana para *suffragists* dari berbagai negara di Eropa untuk bertemu harus gagal karena Perang Dunia I (WILPF, 2022). *Suffragist* merupakan anggota dari *suffrage*, yaitu gerakan yang muncul untuk menuntut hak suara, khususnya bagi para perempuan (Merriam-Webster, 2021). Para *suffragist* ini percaya bahwa konflik harus diselesaikan tanpa kekerasan dan membutuhkan hukum internasional untuk mengaturnya, sehingga mereka melakukan advokasi terkait pembentukan institusi, hukum, dan badan internasional yang dapat mengatur (Ballantyne, 2004).

WILPF melihat bahwa penghapusan senjata berimbas kepada keadilan sosial dan kesejahteraan yang menjadi langkah penting untuk mencapai perdamaian, sehingga WILPF secara aktif mendukung organisasi internasional yang berperan dalam mengangkat topik mengenai pelucutan senjata (Confortini, 2010). Hal ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, merupakan salah satu perbedaan dari pandangan para wanita akan perdamaian. WILPF yang mendukung pelucutan senjata didasari kepercayaan mereka bahwa untuk menghilangkan konflik bersenjata dan memunculkan keadilan sosial, maka dibutuhkan hukum, pemikiran rasional, dan deliberalisasi (Confortini, 2010).

WILPF membawa agenda khusus yang sejalan dengan resolusi PBB terkait wanita dan perdamaian dan keamanan, seperti agenda *Women, Peace and Security* (WPS), *the Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women*

(CEDAW), *the Human Rights Council*, dan analisis berbagai efek konflik dari sudut pandang feminisme (WILPF, 2022).

Belum banyak pembahasan yang melihat mengenai pembangunan perdamaian dari sudut pandang wanita maupun feminisme di wilayah Kepulauan Pasifik. Sejumlah aspek seperti kentalnya nilai tradisional, konflik yang terjadi antar suku, dan peran pria dalam politik di wilayah Pasifik yang belum lama berkembang menjadi contoh di antara alasan lainnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki konsep feminisme dan wanita di wilayah Kepulauan Pasifik untuk mendorong pembangunan perdamaian pada masyarakat yang masih sering terlibat konflik.

FEMINISME UNTUK PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

Feminisme sering kali mendapat prasangka buruk dikarenakan adanya kesalahpahaman mengenai apa itu feminisme. Feminisme sering kali dianggap sebagai upaya untuk membuat posisi wanita di masyarakat berada di atas pria, namun ini tidak benar. Feminisme bertujuan untuk mencapai kesetaraan tanpa memandang gender seseorang dan memberikan ruang yang sama pada kesempatan yang ada. Hal ini mencakup tidak hanya urusan politik, namun juga kesetaraan di lapangan pekerjaan untuk urusan ekonomi, dan juga dalam upaya mencapai dan membangun perdamaian. Feminisme yang dibahas dalam kajian Hubungan Internasional melihat bagaimana di wilayah yang mengalami pasca penyebaran kapitalisme, wanita sering kali tidak mendapat akses untuk kekuatan politik, bantuan hukum, dan kehilangan hak-hak di tingkat lingkungan sosial seperti akses ke kantor pemerintahan dan hak untuk memilih (Steans, 2013).

Kebanyakan feminis kontemporer berupaya untuk menciptakan kebebasan bagi wanita dan menghentikan dominasi laki-laki dengan mendorong ide politik yang bebas gender, dengan hak dan kewajiban tidak dibedakan oleh jenis kelaminnya (Sterba, 1994). Hal ini berangkat dari kondisi wanita dalam sejarah Barat, wanita sering kali tidak memiliki hak apapun, mulai dari hak belajar, turut serta dalam pemilihan umum, kepemilikan atas properti, bahkan hak atas diri mereka sendiri. Bahkan di beberapa wilayah pada abad ke-19 wanita dapat dijual oleh suami mereka sendiri (Burkett & Brunell, 2023).

Para wanita berupaya keras agar kekerasan berdasarkan gender dan kekerasan

seksual dalam perang, serta berbagai efek lain konflik bersenjata terhadap wanita, mendapat perhatian sehingga dapat diselesaikan (Bunch, 2003). Charlesworth (2008) melihat bahwa ada peningkatan pada hubungan internasional yang melihat bahwa wanita memiliki sifat damai, yang didukung oleh pandangan Rey dan McKay (2006, dalam Charlesworth, 2008) yang ia catatkan pada tulisannya, yaitu wanita membuka pandangan politik dan membantu menengahi masalah.

Hubungan antara keamanan. perdamaian dan feminisme turut mendapat perhatian dari PBB yang saat ini menjadi salah satu aktor penting di tingkat global karena merupakan organisasi internasional yang beranggotakan mayoritas negara di dunia. PBB telah melaksanakan empat konfrensi yang pembahasannya befokus pada wanita, perdamaian, dan pembangunan. Konfrensi keempat yang dilaksanakan di Beijing pada tahun 1995 dianggap sebagai konfrensi yang paling berpengaruh dalam membangun hak asasi wanita (Steans, 2013). Selanjutnya pada tahun 2000, PBB mengadopsi Resolusi 1325 atas Wanita, Perdamaian dan Agenda Keamanan yang menjelaskan pentingnya peran wanita dalam pencegahan dan resolusi konflik, pembangunan perdamaian, penjagaan perdamaian, respons humanitarian, rekonstruksi pasca konflik, menekankan pentingnya kesetaraan dalam partisipasi mereka, serta partisipasi penuh dalam upaya menjaga dan mempormosikan perdamaian dan keamanan (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, 2005; United Nations, 2005). Resolusi ini dibentuk oleh berbagai organisasi non-pemerintah untuk mendorong partisipasi wanita dalam proses pembentukan perdamaian, dan disetujui oleh seluruh anggota *UN Security Council* (Confortini, 2005). Selain Resolusi 1325, PBB juga membentuk *Peacebuilding Commission* atau PBC yang menekankan pentingnya peran wanita dalam pencegahan dan penyelesaian masalah dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dan membantu negara-negara untuk menyelesaikan konflik (Charlesworth, 2008).

Sudut pandang mengenai alasan pentingnya feminisme dalam perdamaian dibahas dalam sebuah teori yang saat ini tidak lagi banyak digunakan namun tetap dapat dilihat sebagai posisi post-positifis, yaitu *feminist standpoint*. Kemudian disimpulkan kembali oleh Cockburn (dalam Steans, 2013) yang melihat bahwa dibandingkan hubungan gender yang dapat memicu perang, transformasi gender yang diangkat oleh

feminisme dapat menjadi komponen penting dalam mencapai perdamaian.

Schmidt dalam *The Political Discourse of Anarchy* (1998 dikutip dari Tickner & True, 2018) menyatakan perlunya mempelajari sejarah untuk memahami hubungan internasional kontemporer. Namun sayangnya dalam sejarah peran wanita dalam sejarah sering kali diabaikan. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti para ahli sejarah yang berpendapat bahwa pemikiran yang tidak biasa didapatkan dari kelompok yang memimpin masyarakat atau laki-laki, para wanita tidak dapat mengabdi pada kesempatan untuk membangun ide mereka. Ini dikarenakan gaya hidup wanita yang berbeda, atau usaha untuk memahami konsep yang berkembang tidak memperhitungkan pendapat dan sudut pandang wanita serta budak (Schott, 1997). Selain itu masyarakat Amerika Serikat, khususnya yang berkulit putih, memiliki kesulitan untuk menghubungkan atau melakukan generalisasi antara wanita dan perdamaian karena mereka tidak pernah mengalami perang secara langsung meskipun militer negaranya telah mengadakan gerakan militer di berbagai negara lain (Bunch, 2003). Bunch menyatakan bahwa di abad ke-21 masyarakat dunia menghadapi lebih banyak konflik sipil dan etnis yang tidak terselesaikan, serta semakin buramnya batas antara tentara dan masyarakat sipil akibat kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh militer, alih-alih menjadi semakin damai.

Dalam hubungan konseptual, dominasi merupakan konsep yang menjadi dasar hubungan antrara feminisme dan perdamaian. Dominasi menyebabkan perang dan perdamaian berputar di sekitar patriarki yang menganggap *pacifist* atau pihak yang memilih damai sebagai pihak yang naif dan cengeng, sementara pejuang merupakan pahlawan (Warren & Cady, 1996). Sementara hubungan empiris melihat hubungan antara perdamaian dengan feminisme, khususnya ekofeminis dengan menarik garis antara wanita, anak-anak, manusia dari berbagai ras, dan masyarakat miskin dengan kehancuran lingkungan dan berbagai jenis kekerasan (Warren & Cady, 1996). Warren dan Cady juga menjelaskan beberapa jenis hubungan lain antara perdamaian dan feminisme, namun penulis menggaris bawahi dua hubungan di atas. Menurut penulis dua hubungan itulah yang paling berkaitan dengan perkembangan pergerakan dengan latar belakang feminisme dan tujuan perdamaian selain hubungan mereka dengan sejarah.

Mazurana dan McKay menyatakan bahwa:

> *Peace-building includes gender-aware and women-empowering political, social, economic and human rights. It involves personal and group accountability and reconciliation processes which contribute to the reduction or prevention of violence. It fosters the ability of women, men, girls and boys in their own cultures to promote conditions of nonviolence, equality, justice, and human rights of all people, to build democratic institutions, and to sustain the environment* (McKay, 2004).

Hubungan wanita dengan konflik bersenjata sangatlah kompleks. Konstruksi sosial yang didominasi maskulinitas sering kali melihat bahwa wanita sebagai pihak yang selalu mendorong perdamaian, padahal banyak sekali wanita yang melakukan dan mendukung perang serta gerakan militer (Bunch, 2003). Namun sebuah survei yang dilakukan di wilayah Barat menunjukkan bahwa wanita memang memiliki opini yang berbeda dibandingkan pria dalam hal militer, perang senjata, dan solusi dari sebuah konflik (Brock-Utne, 1984). Hal ini dikarenakan kondisi wanita yang sudah terdiskriminasi dan menerima kekerasan berdasarkan gender, semakin buruk akibat perang dan konflik bersenjata (Bunch, 2003). Para wanita juga berpendapat bahwa perang menyebabkan hilangnya upaya pemenuhan kebijakan domestik terkait kesehatan wanita (Plastas, 2001). Mereka juga melakukan protes terkait tidak diikut sertakannya wanita dalam upaya negosiasi perdamaian, padahal wanita dapat membawa sudut pandang baru dalam pembentukan perjanjian perdamaian dan resolusi konflik (Plastas, 2001).

Meskipun tertinggal akibat diskriminasi yang mereka terima, wanita berhasil menciptakan perdamaian dengan berfokus pada komunitas dan level regional melalui berbagai cara yang dapat membangun perdamaian dan keamanan manusia, misalnya rekonsiliasi (McKay, 2004). Sejak awal tahun 1920-an, banyak organisasi wanita yang mengangkat isu perdamaian dan pelucutan senjata bersamaan dengan dibentuknya departemen terkait topik tersebut setelah menangnya para *suffrage* dalam memengaruhi proses legislatif, lalu berkembang semakin besar hingga bersifat internasional dan transnasional (Plastas, 2001).

Konflik tertentu sering kali menjadi alasan mengapa wanita membentuk sebuah gerakan perdamaian meskipun rencana awal pembentukan gerakan tersebut bukanlah perdamaian dunia (Bunch, 2003). Contoh dari pernyataan tersebut terjadi di Amerika Serikat. Perang Dunia I merupakan kejadian sejarah yang sangat besar, juga memicu

respons berupa demonstrasi wanita pertama pada tahun 1914 yang bertujuan untuk membawa pandangan baru dan persuasi bahwa suara para wanita harus didengar dalam memperjuangkan perdamaian dan keamanan, serta dipicu oleh kekesalan para wanita akan diskriminasi terhadap wanita dalam asosiasi perdamaian yang didominasi oleh pria (Plastas, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (2009) antara lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu, metode, dan hasil penelitian.

Sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi ini merupakan proses pengumpulan data yang didasari oleh empat ciri, yaitu peneliti berhadapan dengan teks atau data angka dan bukan turun ke lapangan atau bertemu dengan saksi, data dapat digunakan langsung oleh peneliti, data biasanya bersifat sekunder, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2004). Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan konsep yang digunakan, yaitu feminisme dalam upaya pembangunan perdamaian. Sehingga tulisan ini dapat menjawab pertanyaan bagaimana pandangan feminisme digunakan dalam upaya membangun perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik.

HASIL DAN DISKUSI

Feminisme dalam Pembangunan Perdamaian di Kepulauan Pasifik

Globalisasi membuat hubungan antar aktor internasional semakin mudah dengan menghilangnya hambatan batas geografis. Hal ini tentu memudahkan konflik untuk terjadi. Namun seperti dua sisi dari koin yang berbeda, hilangnya hambatan batas geografis juga mempermudah upaya mencapai perdamaian. Terdapat dua perdamaian, yaitu perdamaian negatif dengan konflik bersenjata atau kekerasan berhenti dan perang tidak terjadi, serta perdamaian positif yang merupakan pandangan alternatif dengan seluruh kekerasan dihapuskan dan kehidupan bergerak kearah yang ideal (Bunch, 2003). Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, pertanyaan terbesar yang muncul saat ini adalah bagaimana pandangan feminisme yang melihat konflik sebagai hasil dari ekstrimisme patriarki kemudian membangun perdamaian di

wilayah Pasifik, baik perdamaian negatif maupun perdamaian positif?

McKay (2004) menyatakan bahwa dalam proses *peace-building* dengan dasar feminisme, tujuan utamanya ialah menarik perhatian pada opresi, marginalisasi, dan ketidakamanan yang dihadapi wanita, serta mengutarakan agenda perdamaian yang mengikut sertakan wanita sebagai aktor utama. Pengakuan atas kekerasan yang dihadapi wanita merupakan dasar dari konsep feminisme dalam perdamaian dan hak manusia, dikarenakan dominasi laki-laki yang masih dianggap normal di dalam berbagai institusi menyebabkan kekerasan dan ancaman terhadap wanita bertahan (Bunch, 2003). Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat yang kehidupan sosialnya didasari oleh pandangan bahwa gender memengaruhi tingkatan seseorang, capaian seorang pria akan lebih dihargai dibanding capaian seorang wanita, meski keduanya melakukan hal yang sama dengan hasil yang sama pula (Lorber, 2000) dan menyebabkan wanita sering kali tidak mendapat akses untuk kekuatan politik, bantuan hukum, dan kehilangan hak-hak di tingkat lingkungan sosial seperti akses ke kantor pemerintahan dan hak untuk memilih (Steans, 2013). Hal inilah yang terjadi di wilayah Kepulauan Pasifik sebagai salah satu wilayah yang memiliki masalah besar dalam keamanan Wanita. Masalah ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi wanita dalam politik sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penyelesaian isu gender, pemenuhan hak, dan kekerasan (Lee-Koo & Trojanowska, 2017).

Sebelumnya dalam pembahasan mengenai feminisme telah disinggung tentang bagaimana untuk dapat memahami sebuah pembahasan dalam hubungan internasional. Terlebih dulu harus dipahami sejarah dari kejadian yang terlaksana dan pihak yang terlibat (Schmidt, 1998 dalam Tickner & True, 2018). Namun seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal ini menjadi sulit dilakukan karena wanita sering kali tidak dianggap dalam pembahasan mengenai upaya perdamaian. Permasalahan ini, menurut sejumlah ahli, disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, pemikiran tidak biasa dari kelompok pria, kurangnya ruang untuk para wanita berpartisipasi akibat perbedaan gaya hidup, maupun tidak diperhitungkannya wanita dan budak sebagai bagian dari masyarakat pada saat memahami dan mengimplementasikan sebuah konsep yang sedang berkembang (Schott, 1997). Namun ada hal lain yang berkaitan dengan sejarah dan dipegang erat oleh masyarakatnya, yaitu tradisi.

Pembahasan mengenai wanita di wilayah Kepulauan Pasifik masih berfokus pada bagiamana menjadikan ide global atas keamanan dan perdamaian serta kesetaraan gender dapat terikat dengan nilai-nilai lokal di wilayah tersebut dengan melakukan lokalisasi atau penerjemahan hasil diskusi global (George, 2013). Hal ini dilaksanakan karena wilayah Asia-Pasifik merupakan wilayah yang negaranya mementingkan otonomi negara dan masih memiliki budaya untuk tidak menerima pengaruh dan tekanan dari luar, serta membatasi penerimaan ide global (Lee-Koo & Trojanowska, 2017). Di wilayah Kepulauan Pasifik sendiri, selain nilai-nilai yang dibawa oleh modernitas, nilai yang berasal dari leluhur juga menjadi pertimbangan penting. Tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang lekat di masyarakat merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Pasifik yang tidak terbatas pada kehidupan sehari-hari saja, namun juga dalam pelaksanaan politik. Dan dalam upaya pembangunan perdamaian berarti gerakan yang dilakukan harus berfokus pada proses psikologikal, relasi, dan spiritual secara keseluruhan (Mazurana dan McKay 2001 dalam McKay, 2004). Inilah yang dilakukan oleh kelompok, organisasi, dan aktivis wanita di wilayah Kepulauan Pasifik.

Menggunakan nilai yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sebagai patokan untuk kebersamaan. Berangkat dari sejarah kelompok advokasi sosial di Pasifik Selatan yang dibentuk sesuai dengan isu lokal yang ada, mulai dari kemiskinan, ketimpangan gender, hingga isu perubahan iklim (Bhagwan-Rolls & Stone, 2016). Penggunaan persamaan nilai tradisional masyarakat dalam pelaksanaan gerakan feminisme untuk mencapai perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. *Civil Society Organizations* atau CSO di wilayah Pasifik sering kali muncul dengan persamaan yang ada, seperti *wantok, kastom,* dan *big men* di wilayah Melanesia. Hal inilah yang dilaksanakan oleh masyarakat Kepulauan Pasifik untuk mencapai perdamaian dengan menggunakan perspektif feminisme pada *Charter of Feminist Principles for Pacific Feminist* yang merupakan hasil dari forum yang diadakan di Fiji pada tahun 2016 (Underhill-Sem, 2019). Piagam ini menggaris bawahi persamaan yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Pasifik di antara perbedaan yang ada, yaitu *wansolwara* atau laut, *vanua* atau tanah, dan

tua'a atau nenek moyang (Pacific Feminist Forum, 2016).

Selain persamaan yang dimiliki sebagai masyarakat Kepulauan Pasifik, paham feminisme untuk perdamaian di wilayah tersebut juga dilakukan dengan mengangkat nilai keibuan. Nilai ini berasal dari gelombang kedua feminisme yang menggunakan penggambaran *earth mother* dan representasi akan sifat penuh kedamaian yang ditawarkan seorang ibu namun tetap terbuka atas ide dan tindakan sebagai penyemangat kelompok perdamaian yang beranggotakan wanita (Corrin, 2008). Penggambaran ini terjadi di wilayah Kepualauan Pasifik dan dibahas oleh George (2010) dalam tulisannya tentang bagaimana penggunaan perspektif feminisme dalam pembicaraan politik dan upaya untuk mencapai perdamaian di wilayah Kepulauan Pasifik. Penggunaan perspektif ini sering kali dilakukan dengan membandingkan perilaku politik maskulin yang bersaing secara ekstrim tanpa ingin mengalah dengan menghubungkan isu yang ada dengan keluarga dan keibuan, dua hal yang berkaitan erat dengan wanita di wilayah Pasifik (George, 2010). Penggunaan perspektif ini sebelumnya juga telah sering digunakan untuk implementasi ide-ide yang dianggap bertentangan dengan ide populer, disebabkan oleh masih besarnya komentar mengenai aplikasi feminisme di wilayah Kepulauan Pasifik bertujuan untuk meningkatkan status para wanita (George, 2010). Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam urusan bahasa. Bhagwan-Rolls dan Stone (2016) menjelaskan bahwa aktivis wanita di wilayah Kepulauan Pasifik memanfaatkan celah yang ditimbulkan UNSCR 1325 karena PBB mewajibkan pengunaan bahasa yang telah mereka akui dan menyebabkan kerugian bagi kelompok masyarakat yang masih menjunjung nilai budaya dan sosial lokal. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan penerjemahan resolusi dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kepulauan Pasifik (Bhagwan-Rolls & Stone).

Menurut data yang didapatkan oleh Lee-Koo dan Trojanowska (2017), wilayah Asia Pasifik merupakan wilayah terakhir yang melakukan implementasi Resolusi 1325 mengenai wanita, perdamaian, dan agenda keamanan atau *Women, Peace, and Security Agenda* (WPS) yang diresmikan oleh PBB pada tahun 2000. Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik sendiri baru mengeluarkan Rencana Aksi Regional terkait isu ini pada tahun 2012 (Lee-Koo & Trojanowska, 2017),10 tahun setelah berbagai gerakan advokasi dan lobi

dilakukan oleh aktivis wanita di tingkat nasional dan regional (George, 2014). Salah satu kelompok yang berusaha untuk mengangkat Resolusi 1325 ke dalam cakupan kepentingan pemerintah regional ialah *Pacific PeaceWomen Project* yang melakukan kampanye dan menghubungkan resolusi tersebut dengan institusi pemerintah nasional dan regional (George, 2014).

Rolls dan Evans (2020) juga menjelaskan bahwa feminisme yang berasal dari respons terhadap konflik bersenjata dan krisis politik di wilayah Kepulauan Pasifik mulai mengalami peningkatan di tahun 1980-an pada saat kampanye untuk kemerdekaan negara Pasifik dan implementasi penghentian nuklir dilaksanakan. Respons atas konflik bersenjata ini bergeser menjadi upaya untuk mencapai perdamaian menggunakan perspektif feminisme setelah dilakukannya adaptasi pada tahun 1995 terkait hasil dari Konfrensi Dunia terkait Wanita oleh PBB yang menghasilkan *Beijing Platform for Action* (Rolls & Evans, 2020). Meski begitu, akar dari pergerakan yang dilaksanakan oleh wanita di wilayah Kepulauan Pasifik sudah dimulai pada upaya pembangunan regional pada tahun 1940-an (Bhagwan-Rolls & Stone, 2016). Saat ini peningkatan kesadaran dan implementasi feminisme dalam upaya mencapai perdamaian berhubungan erat dengan meningkatnya konflik kekerasan yang didasari ketimpangan sosial dan gender dalam perkembangan kapitalisme (Underhill-Sem, 2019).

Namun di samping mengalami peningkatan, tentu saja ada sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai feminisme kedalam aktivitas yang berupaya untuk mencapai perdamaian. Salah satunya diangkat oleh de Alwis, Mertus, dan Sajjad (2013, dalam George, 2016) yang menggaris bawahi tentang bagaimana pembentukan Rencana Aksi Regional ini dapat menjadi pisau dengan dua sisi bagi gerakan feminisme dan wanita di wilayah Pasifik dengan melihat keberadaan wanita sebagai formalitas dalam upaya negosiasi perdamaian. Ditambah kondisi PIF yang aktivitasnya seringkali didasari oleh kepentingan negara anggota yang lebih kuat dibandingkan kepentingan regional secara keseluruhan (George, 2016). Ketakutan ini sudah tercermin dari pandangan mengenai pergerakan feminisme dalam upaya perdamaian sejak awal, yang pada awalnya terdapat ketakutan akan terkuburnya inti dari feminisme itu sendiri ketika wanita ikut serta dalam pembicaraan atau tindakan yang

mengangkat topik perdamaian (Vellacott, 1993).

Selain itu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh wanita di wilayah Kepulauan Pasifik yang hendak mengangkat isu gender dan perdamaian ialah rendahnya perwakilan wanita di tingkat legislatif negara Kepulauan Pasifik. Permasalahan ini dihadapi dalam upaya implementasi Rencana Aksi Regional *Women Peace and Security* yang dibentuk oleh para pemimpin dari Kepulauan Pasifik (Rolls & Evans, 2020). Hal ini diselesaikan melalui pembentukan kerja sama dengan media dan memanfaatkan komitmen pembentuk kebijakan untuk melakukan diskusi dengan kelompok masyarakat. Selanjutnya melakukan lobi untuk urusan wanita, perdamaian, dan agenda keamanan pada Rencana Aksi Regional (Bhagwan-Rolls & Stone, 2016). Selain itu, upaya aktivis wanita di wilayah Kepulauan Pasifik juga memunculkan kesempatan bagi para wanita untuk menunjukkan peran mereka di tingkat internasional dan regional. Ini merupakan sebuah hal yang telah diupayakan sejak tahun 1940-an dan mampu mendorong adanya birokrasi dan konfrensi wanita Pasifik di tahun 1980-an dan diskusi di Forum Kepulauan Pasifik terkait isu gender di tahun 1990-an (George, 2011).

Meskipun tertinggal akibat diskriminasi yang mereka terima, wanita berhasil menciptakan perdamaian dengan berfokus pada komunitas dan level regional melalui berbagai cara yang dapat membangun perdamaian dan keamanan manusia (McKay, 2004). Kesadaran pelaksana politik di wilayah Kepulauan Pasifik atas pentingnya kesetaraan dan peran seluruh gender dapat dilihat dari implementasi *United Nations Security Council Resolution* atau UNSCR 1325 ke dalam Rencana Aksi Regional yang dibentuk oleh Forum Kepulauan Pasifik atau *Pacific Islands Forum* (PIF) sebagai bentuk implementasi formal atas kebijakan kebijakan Wanita, Perdamaian, dan Agenda Keamanan yang sebelumnya telah kita bahas (George, 2016). Institusionalisasi ini mendorong terbukanya ruang politik bagi pembahasan dan pembentukan kebijakan yang memperhitungkan keamanan dan gender yang akan membahas permasalahan keamanan bagi wanita sebagai hasil dari konflik di tingkat lokal hingga konflik bersenjata (George, 2014).

SIMPULAN

Organisasi wanita yang bergerak untuk menyelesaikan konflik dan berupaya untuk mencapai perdamaian semakin berkembang,

termasuk di wilayah rawan konflik seperti Kepulauan Pasifik. Penggunaan pandang feminisme dan kelompok atau organisasi wanita yang bergerak untuk menghentikan konflik dan membangun perdamaian mulai berkembang pada tahun 1980-an.

Kebanyakan pergerakan wanita di wilayah Kepulauan Pasifik memanfaatkan nilai-nilai persamaan yang masih kental penghormatannya di masyarakat Pasifik, seperti laut, tanah, dan tetua. Selain itu mereka juga membandingkan nilai politik tradisional yang patriarki dan maskulin dengan sifat keibuan yang dianggap penting di wilayah Kepulauan Pasifik. Sifat maskulin politik yang rawan konflik dianggap dapat diselesaikan dengan mengizinkan paham feminisme masuk melalui sifat keibuan yang menjaga dan damai.

Pergerakan wanita dalam upaya untuk mencapai perdamaian berfokus pada level komunitas dan regional. Hal ini dapat dilihat terjadi di wilayah Kepulauan Pasifik. Implementasi Resolusi 1325 terkait wanita, perdamaian, dan agenda keamanan di wilayah regional Kepulauan Pasifik memang dibilang cukup lambat. Resolusi ini dibentuk pada tahun 2000 dan baru dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Regional Kepulauan Pasifik pada tahun 2012, 12 tahun setelah peresmian resolusi dan 10 tahun upaya aktivis wanita untuk melakukan lobi. Pergerakan feminisme untuk mengangkat isu wanita dan perdamaian di wilayah Pasifik juga mengalami sejumlah permasalahan. Isu utamanya ialah kurangnya jumlah representasi wanita di tingkat legislatif pemerintah negara di wilayah Pasifik, dan juga munculnya kemungkinan untuk Resolusi 1325 yang implementasinya dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Regional Kepulauan Pasifik untuk berbalik menyerang posisi wanita yang mewakili dalam upaya perdamaian di wilayah Pasifik dengan menjadikan kehadiran mereka sebagai formalitas dalam diskusi resmi. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat kelompok wanita di wilayah Pasifik untuk terus melakukan lobi dan gerakan untuk mencapai perdamaian dengan mengangkat pentingnya peran wanita dalam pembangunan perdamaian.

REFERENSI

Ballantyne, E. (2004). *WILPF History: Past, Present, Future.* Peace and Freedom vol. 64 (2). Philadelphia: WILPF.

Bhagwan-Rolls, S., & Stone, L. (2016). The Role of Women in Regional Peace and Security. In *Civil Society, Peace, and*

Power. Maryland: Rowman&Littlefield.

Brock-Utne, B. (1984). The Relationship of Feminism to Peace and Peace Education. *Bulletin of Peace Proposals*, *15*(2), 149–153. https://doi.org/10.1177/096701068401500207

Bunch, C. (2003). Feminism, Peace, Human Rights, and Human Security. *Canadian Woman Studies/Les Cahiers de La Femme*, *22*(2).

Burkett, E., & Brunell, L. (2023). *Feminism*. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/feminismon January 26, 2023

Charlesworth, H. (2008). Are Women Peaceful? Reflections on the Role of Women in Peace-Building. *Feminist Legal Studies*, *16*(3), 347–361. https://doi.org/10.1007/s10691-008-9101-6on September 8, 2022

Confortini, C. (2005). Women, Feminism, and Peace: Highlights from the 2005 World Social Forum. *Peace and Freedom*, *65*(1).

Confortini, C.C. (2010). *Links between Women, peace, and Disarmament: Snapshots from the WILPF* from Gender, War, and Militarism. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Corrin, J. (2008). Ples Bilong Mere*: Law, Gender and Peace-Building in Solomon Islands. *Feminist Legal Studies*, *16*(2), 169–194. https://doi.org/10.1007/s10691-008-9095-0 on January 26, 2023

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

George, N. (2010). 'Just like your Mother?' the Politics of Feminism and Maternity in the Pacific Islands. *Australian Feminist Law Journal*, *32*(1), 77–96. https://doi.org/10.1080/13200968.2010.10854438 on January 26, 2023

George, N. (2011). Pacific Women Building Peace: A Regional Perspective. *The Contemporary Pacific*, *23*(1).

George, N. (2013). 7 Beyond 'Cultural Constraint': Gender, Security and Participation in the Pacific Islands. In *Responsibility to Protect and Women, Peace and Security* (pp. 155–180). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004257696_009 on January 26, 2023

George, N. (2014). Promoting Women, Peace and Security in the Pacific Islands: hot conflict/slow violence. *Australian Journal of International Affairs*, *68*(3), 314–332. https://doi.org/10.1080/10357718.2014.902032 on January 26, 2023

George, N. (2016). Institutionalising Women, Peace and Security in the Pacific Islands: Gendering the 'architecture of entitlements'? *International Political Science Review*, *37*(3), 375–389. https://doi.org/10.1177/0192512116629819 on January 26, 2023

Lee-Koo, K., & Trojanowska, B. K. (2017). Does the United Nations' Women,

Peace and Security agenda speak with, for or to women in the Asia Pacific? The development of National Action Plans in the Asia Pacific. *Critical Studies on Security*, *5*(3), 287–301. https://doi.org/10.1080/21624887.2017.1411667 on January 26, 2023

Lorber, J. (2000). The Social Construction of Gender. In *The Social Constructiion of Difference and Inequality: Race, Class, Gender, and Sexuality*. California City: Mayfield Publishing Company.

McKay, S. (2004). Women, Human Security, and Peace-Building: A Feminist Analysis. In *IPSHU English Research Report Series no.19, Conflict and Human Security: A Search for New Approaches of Peace-Building.*

Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women. (2005). *Landmark Resolution on Women, Peace, and Security*. United Nations.

Pacific Feminist Forum. (2016). *Charter of Feminist Principles for Pacific Feminist*.

Plastas, M. (2001). *'A band of noble women': The WILPF and the politics and consciousness of race in the women's peace movement, 1915-1945* [Thesis]. State University of New York.

Rolls, S., & Evans, A. (2020). *Feminist Peace and Security in Pacific Islands*. Oxford: Oxfam International.

Schott, L. (1997). *Reconstructing Women's Thoughts : The Women's International League for Peace and Freedom Before World War II*. Redwood City: Stanford University Press.

Steans, J. (2013). *Gender & International Relations*. . Cambridge: Polity Press.

Sterba, J. P. (1994). Feminist Justice and the Pursuit of Peace. *Hypatia*, *9*(2), 173–187. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1994.tb00439.x on September 8, 2022

Tickner, J. A., & True, J. (2018). A Century of International Relations Feminism: From World War I Women's Peace Pragmatism to the Women, Peace and Security Agenda. *International Studies Quarterly*. https://doi.org/10.1093/isq/sqx091 on September 8, 2022

Underhill-Sem, Y. T. R. R. T. (2019). *Pacific Feminism*.

United Nations. (2005). *Women & Election*. United Nations Department of Public Information.

Vellacott, J. (1993). A place for pacifism and transnationalism in feminist theory: the early work of the women's international league for peace and freedom. *Women's History Review*, *2*(1), 23–56. https://doi.org/10.1080/09612029300200021 on September 8, 2022

Warren, K., & Cady, D. (1994). Feminism and Peace: Seeing

Connections. *Hypatia, 9*(2), 4-20. doi:10.1111/j.1527-2001.1994.tb00430.x on January 26, 2023

Warren, K., & Cady, D. (1996). In Warren, K. & Cady, D. (Ed.), *Bringing Peace Home: Feminism, Violence, and Nature*. Indiana: Indiana University Press

Meriam-Webster.com Dictionary. (2021). *Suffragist*. Meriam-Webster. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/suffragist on September 8, 2022

WILPF. (2022) *Leverage Feminist Perspectives on Peace*. Women's International League for Peace & Freedom. Retrieved from https://www.WILPF.org/work-areas/feminist-perspectives-on-peace/ on September 8, 2022

WILPF. (2022) *Our Herstory*. Women's International League for Peace & Freedom. Retrieved from https://www.WILPF.org/our-herstory/ on September 8, 2022